

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara parsial variabel Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,535 < 1,99444$) dan nilai signifikansi $0,129 > 0,05$. Hipotesis yang menyatakan bahwa Rasio Efektivitas PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal tidak dapat dibuktikan.
2. Secara parsial variabel Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,766 > 1,99444$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah di Lampung tergolong efisien.
3. Secara parsial variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-0,681 < 1,99444$) dan nilai signifikansi $0,498 > 0,05$. Dalam hal ini berarti Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung belum mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Secara parsial variabel Rasio Pertumbuhan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,576 > 1,99444$) dan nilai signifikansi $0,012 < 0,05$. Pengukuran terhadap pertumbuhan PAD dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi dalam komponen PAD yang perlu mendapat perhatian. Hal tersebut akan menjadi nilai tambahan

pula untuk alokasi anggaran belanja modal.

5. Secara simultan variabel Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dengan nilai F_{hitung} memiliki nilai yang lebih besar dari nilai F_{tabel} ($5,815 > 2,50$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi α 5% yaitu $0,000 < 0,05$. Belanja Modal pemerintah daerah tersebut mengalami peningkatan atau penurunan karena adanya pengaruh secara bersama-sama atau simultan dari keempat variabel tersebut pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka berikut saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat menambah periode penelitian serta sampel penelitian sehingga data dan hasil yang diperoleh akan lebih baik. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya mengambil dari satu provinsi saja tetapi lebih luas lagi.
2. Rendahnya *Adjusted R2* dari model yang di uji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap alokasi belanja modal, sehingga selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan variabel lainnya diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini seperti dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan pertumbuhan ekonomi.
3. Bagi para pemakai laporan keuangan yang akan mengambil suatu keputusan dalam pengalokasian belanja modal, hendaknya tidak hanya mengandalkan data indikator kinerja keuangan mengenai rasio efektifitas pad, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio pertumbuhan pad, tetapi perlu juga memperhatikan faktor faktor lain dalam hubungannya dengan belanja modal yaitu dengan menganalisis

pertumbuhan pendapatan lainnya seperti rasio derajat desentralisasi, rasio derajat kontribusi BUMD, dan faktor lainnya.

4. Pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif yang menyusun APBD, sebaiknya lebih memperhatikan pengalokasian belanja modal di tahun-tahun yang akan datang terutama belanja modal yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung juga seharusnya tidak harus selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Agar kedepannya Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dapat tumbuh mandiri, mampu mengelola keuangannya sendiri dengan baik dan benar, serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.